

naufal

by Jurnal Hukum

Submission date: 17-Feb-2023 09:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2016181191

File name: JURNAL_NAUFAL_AKHIR.docx (42.42K)

Word count: 2582

Character count: 16892

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKTIF TANPA IZIN YANG SAH DI BANGKA BELITUNG

Naufal Catur Rangga¹, Emy Rosnawati²

¹Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract- *Forests are very important to balance environmental conditions due to global warming, especially in productive forests in Indonesia. Recently there has been a lot of burning in forests without legal permits caused by a lack of seriousness or courage to act decisively in tackling this. the purpose of this research is to discuss juridically the disparity between the Sungailiat District Court Decision Number 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, .395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl regarding burning in productive forests without valid permits using normative juridical research methods. The results obtained are that there is a disparity between the Sungailiat District Court Decision Number 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, .395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl regarding burning in productive forests without a valid permit. The judge's consideration is not in accordance with the Job Creation Law 11/2020. The government is responsible for preventing forest fires*

Keywords: burning, forest area, without permission

Abstrak- Hutan sangatlah penting untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan akibat pemanasan global, terutama pada hutan produktif di Indonesia. Belakangan ini banyak terjadi pembakaran pada hutan tanpa izin yang sah diakibatkan oleh kurangnya kesungguhan atau keberanian untuk bertindak secara tegas dalam menanganinya. Tujuan penelitian ini membahas secara yuridis disparitas antara Putusan PN Sungailiat No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan Sungailiat .395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada hutan produktif tanpa izin yang sah dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yakni terdapat disparitas antara Putusan PN sungailiat No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan Sungailiat .395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada hutan produktif tanpa izin yang sah. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja 11/2020. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah pembakaran hutan.

Kata Kunci: pembakaran, kawasan hutan, tanpa izin

I. PENDAHULUAN

Hutan sangatlah penting untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan akibat pemanasan global. Dengan demikian, untuk menjaga peran hutan sebagai penyeimbang lingkungan, terutama pada hutan produktif di Indonesia. Baru-baru ini telah terjadi beberapa kebakaran hutan di hutan produksi tanpa izin yang sah.[1] Kebakaran hutan merupakan fenomena alam dan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang merenggut nyawa manusia. Pembakaran lahan ilegal di hutan produktif seringkali merupakan akibat dari kurangnya kejujuran atau keberanian untuk bertindak dan secara terbuka meminta pertanggungjawaban masyarakat atas tindakan mereka, terutama jika hal ini terjadi berulang kali. [2] Kebijakan pemerintah meliputi pembuatan undang-undang dan peraturan. UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Kehutanan, UU Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan No 18/2013 dan UU Cipta kerja No 11/2020

13) menariknya, penelitian ini berusaha menganalisis disparitas Putusan PN Sungailiat No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan Sungailiat .395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, Putusan PN Sungailiat No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah. Maka diperlukan penelitian terdahulu 12) guna sebagai acuan untuk peneliti melakukan penelitian selanjutnya. Kajian pertama oleh Ardhi Yusuf, Hapsah, Sofyan Husein Siregar, Dodik Ridho Nurrochmat dengan judul Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi 6) Riau oleh Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia Vol.6 No.2 Tahun 2019. Tujuannya untuk menganalisis kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan di 9) provinsi Riau. Menurut metode hukum empiris. Disimpulkan bahwa hasil kajian dampak peralihan kebakaran di Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi biofisik lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan penerapan hukum dan kebijakan. terkait dengan perencanaan wilayah. Kajian kedua dilakukan oleh Miftahul Ulfah, Endang Erawan, Dini Zulfiani dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (uptd) Kesatuan Produksi Hutan (kphp) Meratus Balikpapan 5) dalam bentuk publikasi e-government, vol. 7, No.1 tahun 2019. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) Balikpapan Meratus mengimplementasikan kebijakan penanggulangan hutan dan kebakaran hutan. Menurut metode hukum empiris. Kesimpulannya implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di UPTD KPHP Kabupaten Meratus Balikpapan berjalan cukup baik dari sisi sumber daya manusia yang tercermin dari tugas pokok dan tugas dinas khusus. Dalam bidang pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang relatif kecil, 12 anggota yang ada sudah cukup untuk melaksanakan operasi ini secara efektif dan efisien. Anda hanya perlu melatih anggota yang ada untuk memanfaatkan alat yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, sarana dan prasarana atau peralatan yang memadai masih belum tersedia untuk mendukung pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran hutan dan perdesaan, termasuk kurangnya anggaran yang 11) diperlukan untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan perdesaan. Kajian ketiga ditulis oleh Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat dengan judul Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam PAMPAS: Jurnal Pidana Vol.1 No. 3 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model polisi bagi mereka yang memulai 6) kebakaran hutan dan lahan. Menurut metode hukum empiris. Dari sini dapat disimpulkan bahwa provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan lingkungan yang cukup kompleks, terutama masalah degradasi ekosistem hutan dan gambut, menjadikannya salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun, namun aparat penegak hukum menerapkan pengelolaan hutan lestari pada kebakaran.

Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas sebagaimana disebutkan diatas fokus tujuan penelitian yakni mengetahui analisis disparitas antara Putusan PN Sugailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah. yang dianalisis menggunakan Undang-undang cipta kerja 11/2020 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitiannya adalah hokum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach).

Dari penelitian terdahulu sebagai mana disebutkan diatas fokus tujuan penelitian adalah menganalisis Disparitas antara Putusan PN Sugailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran di kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah. yang dianalisis menggunakan Undang-undang cipta kerja 11/2020 dan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti dalam hal ini mengangkat isu hukum terkait bagaimana analisis tindak pidana pembakaran hutan di kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah di sungailiat, Bangka belitung . Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa hukum yang ingin mengkaji tentang pembakaran di kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian dimana hukum dipahami sebagai ketentuan hukum yang tertulis.[3] Pendekatan studi kasus digunakan untuk masalah penelitian ini. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU tentang Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan No 18 Tahun 2013, UU tentang cipta kerja No 11 Tahun 2020 dan Putusan PN Sungailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl, No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran pada kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah. hasil penelitian dan analisis hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan produktif terbatas tanpa izin yang sah di Sungailiat. Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, majalah, artikel, tesis, disertasi dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian tema Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan penalaran deduktif.[4]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1(11) KUHAP, putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibacakan dengan jelas di depan umum, yang membebaskan dari semua tuntutan, berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Keputusan pengadilan hanya sah jika diumumkan di pengadilan terbuka.[5] Berdasarkan analisis tersebut perbedaan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, Sungailiat dipilih dalam penelitian ini, Bangka Belitung karena banyak kejahatan di daerah ini yang melibatkan pembakaran di kawasan hutan. Maka sebagai berikut penjabarannya:

A. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Pada tanggal 23 September 2019, Kapolda Bangka Belitung bersama anggota Polres Bangka Belitung melakukan patroli helikopter untuk memantau kebakaran hutan di Pulau Bangka. Saat berpatroli, tim helikopter melihat layang-layang di rumpun pohon. melihat api menghanguskan beberapa pohon di kawasan tersebut, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kebakaran hutan, ditemukan satu unit Mini PC yang operator Mini PC-nya adalah Abdullah bin Fatahila (belakangan) di Desa Air Anyir, Merawang -Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang memerintahkan dan turut serta dalam pembakaran hutan secara sengaja

Tuntutan penuntut umum

1. Meyakinkan terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (kemudian) bersalah dan dapat dihukum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dapat dituntut sesuai UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada dakw 10 n 1
2. Menghukum terdakwa Abdullah als dul ketem bin Fatahila dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi penjara selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dalam penahanan praperadilan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Pertimbangan hakim

Mengingat fakta bahwa terdakwa tidak pernah mencoba untuk "membakar hutan" berdasarkan Pasal 78(3) jo.50 (3) UU 41/1999. Menurut dakwaan dan tuntutan JPU yang diuraikan mempertimbangkan fakta kedua dan ketiga, tuntutan ini juga harus ditolak.

Putusan hakim

1. Terdakwa Abdullah sebagai dul ketem bin fatahila (nanti) tersebut akhirnya dan secara sah dinyatakan bersalah dalam perbuatan alternatif pertama ikut serta dalam pembakaran hutan 4
2. Oleh karena itu, menghukum terdakwa 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti kurungan 1 bulan.

B. ³ Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Pada hari Rabu, 16 bulan 10 pada tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Syamsi Sahadi menumpuk ranting dan daun kering di lokasi kebun yang terletak di sebuah gang, Desa Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Lalu ketika menjadi gundukan, Syamsi Sahadi yang kemudian dituduh sebagai Samsi bin Sahadi, langsung menyalakan tumpukan dahan dan daun kering dengan korek api Gas yang disiapkan oleh terdakwa dimana terdakwa menyiapkan satu tong air, 2 (dua) kaleng cat dan 4 (empat) kaleng plastik ukuran 20 liter berisi air sebelum membakar tumpukan/daun kering agar api tidak padam. kemudian, ketika api menyebar luas, namun karena cuaca panas dan angin sangat kencang, tim darurat tidak dapat memadamkan api, kemudian api dengan cepat menyebar ke tempat lain dan kemudian api membesar tidak lama setelah Petugas Pemadam Kebakaran setempat. Lurah dan warga setempat membantu tim tanggap darurat memadamkan api agar tidak meluas jauh

Tuntutan Penuntut umum

1. Meyakinkan dan menyatakan terdakwa Syamsi Sahadi telah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dan menjatuhkan sanksi pidana kepadanya karena melanggar Pasal 78 (3) juncto Pasal 50 (3) No. 41/1999 tentang kehutanan. Sebagai dakwaan;
2. Menghukum terdakwa Syamsi Sahadi als Syamsi dengan pidana kurungan ¹⁶ 7 (tujuh) bulan dikurangi ⁴ dakwa dipidana tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan kurungan.

Pertimbangan hakim

bahwa hakim berpendapat bahwa uraian tentang perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, maka hakim menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan alternatif ⁴ pertama, yaitu. melanggar bagian tersebut 78/3 Jo. Pasal 50/ 3, ayat d, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Pembakaran hutan

putusan hakim

1. Terdakwa Syamsi sahadi tersebut di atas sebagai samsi bin sahadi dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pembakaran yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti menjadi kurungan 1 (satu) bulan.

C Putusan PN Sungailiat No. 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Ba³va yang dituduhkan Herman sebagai Herman bin Idris (tertunda) pada Senin 23 bulan 09 tahun 2019 di Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang memerintahkannya dan terlibat dalam pemadaman yang melakukan dan turut serta dalam pembakaran hutan

Tuntutan Penuntut umum

1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (selanjutnya) dan secara meyakinkan bersalah atas pelanggaran berdasarkan Pasal 78(3) juncto Pasal 50(3) d dan dikenakan hukuman pidana UU 41/1999 tentang kehutanan. seperti pada alternatif pertama
2. Menghukum terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (kemudian) dengan pidana penjara 3 (tiga)

bulan kurang dari masa penahanan sementara terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah subsidair) 1 bulan kurungan.

Pertimbangan hakim

Menimbang bahwa Pasal 78(3) jo. 50 ayat 3 huruf d UU Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Nomor 1 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah secara final dan meyakinkan melakukan dalam tindak pidana

Putusan hakim

1. Menyatakan terdakwa Herman sebagai Herman bin Idris (alm) terbukti secara meyakinkan terlibat dalam turut serta pembakaran hutan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menghukum terdakwa 3 bulan kurungan.

D. Analisis Disparitas Putusan PN sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, putusan 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl berdasar pada Undang-undang Cipta Kerja

Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang disebut adil apabila sesuai dengan hukum yang berlaku.[6] Berdasarkan teori tersebut, dalam putusan PN Sungailiat No. 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang pembakaran di hutan produksi tanpa izin yang sah. Dengan pidana kedua yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl untuk pembakaran hutan produksi tanpa izin yang masih berlaku dan berbeda sehingga penjatuhan sanksinya berbeda. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang pembakaran hutan produksi tanpa izin yang sah sebagai akibat dari kesengajaan. Namun, pandangan hakim tersebut tidak sejalan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Pasal 37 UU Hak Cipta No. 11 Tahun 2020, UU Pencegahan Orang dan/atau Badan Hukum Penanggung Jawab Pencegahan Perusakan Hutan UU Perusakan Hutan dan Cipta Kerja. Artinya, ada pembatasan tertentu dalam penggunaan sumber daya hutan dan pengaturan pembakaran dan pemantauan hutan. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Pengadilan Negeri Sungailiat, Sgl menghukum terdakwa 3 (tiga) bulan penjara dan Denda 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diubah menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan putusan 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl menghukum terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara dan denda 5.000.000. (lima juta rupiah) jika denda tidak dibayar diubah menjadi 1 (satu) bulan kurungan, dalam Putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl terdakwa divonis 3 (tiga) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 Untuk itu perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang ada, agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.[7] Dengan demikian, para hakim mempertimbangkan menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam memutus perkara.[8] tetapi hanya disesuaikan dengan faktor-faktor yang dapat digunakan dalam menentukan ringan dan beratnya hukuman, sehingga menghasilkan 2 putusan yang dikatakan sama-sama adil, yaitu:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. turut membakar hutan
3. membakar hutan

IV. KESIMPULAN

. Menurut penulis terjadi disparitas antara putusan satu dengan putusan lainnya. Perbedaan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa dan hakim yang berbeda dalam memutus perkara, serta tindak pidana yang berbeda. Dan ketiga putusan tersebut terjadi pada Putusan PN sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang pembakaran pada hutan produktif tanpa izin yang sah karena unsur kesengajaan namun dengan tindak pidana yang berbeda. namun Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja 11/2020 Mencermati berdasarkan Pasal 37 UU Hak Cipta Nomor 11/2020 UU terkait Pencegahan Perusakan Hutan dan UU Cipta Kerja, badan hukum dan/atau badan yang mendapat izin terkait dengan pembakaran hutan bertanggung jawab untuk mencegah perusakan hutan. Ini berarti bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam penggunaan sumber daya hutan dan juga dalam pengaturan pembakaran hutan .

REFERENSI

- [1] Ardhi Yusuf , Hapsoh , Sofyan Husein Siregar , Dodik Ridho Nurrochma. Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia Vol 6, Nomor 2. 2019.
- [2] Miftahul Ulfah ,Endang Erawan ,Dini Zulfiani. Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh unit pelaksana teknis daerah (uptd) kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) meratus Balikpapan. eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1. 2019
- [3] Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat. Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan.PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1, Nomor 3.2020
- [4] Syaufina, L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Pola, penyebab dan dampak kebakaran. Bayumedia Publishing, Malang.
- [5] Budiningsih, K. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(1).2017
- [6] Rasyid, F. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. Jurnal Lingkar Widyaistwara, 1(4). 2014
- [7] Meiwanda, G. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(3). 2016
- [8] David, G. (2014). Indonesia's Fire and Haze. Jakarta: Ombak Press

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Novita Endah Lestari. "Hakim Ad Hoc Pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 Publication	4%
2	repository.unbari.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

9	dli.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
11	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	1 %
13	Almonika Cindy Fatika Sari. "Acknowledgment of Adat Law-Based Tenure in the Courtroom: Study of Decisions on Criminal Acts of Land Clearing by Burning, Logging Trees Without Permits, and Collecting Plantation Products Without Permits", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2023 Publication	1 %
14	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
15	Muhammad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, Uswatun Hasanah. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan:", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2022 Publication	1 %

16 cts.pn-medankota.go.id 1 %
Internet Source

17 ojs.uma.ac.id 1 %
Internet Source

18 www.coursehero.com 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On